



2024

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

**Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur**

Belitung Timur, 7 Agustus 2023



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan upaya perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini belum secara sempurna terselesaikan seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang rencana kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur pada Tahun Anggaran 2024.

Pada kesempatan ini disampaikan kepada seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini, Saya ucapkan terima kasih. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah S.W.T dan dapat mewujudkan perencanaan yang baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Manggar, 7 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Perdagangan
Kabupaten Belitong Timur



HARLI AGUSTA, ST

NIP 19750821 200212 1 005



Daftar Isi

<i>Halaman Judul.....</i>	<i>i</i>
<i>Kata Pengantar</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Isi.....</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Tabel.....</i>	<i>iv</i>
<i>Daftar Gambar.....</i>	<i>v</i>
 BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
 BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	II-20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-28
 BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	III-2
3.3 Program dan Kegiatan	III-5
 BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP	IV-1
4.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2023 melalui APBD II.....	IV-1
4.2 Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui DAK.....	IV-1
4.3 Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui APBD I dan DABA.....	IV-1
4.4 Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui APBN.....	IV-2
4.5 Usulan Partisipatif (RPK) Tahun 2024.....	IV-2
 BAB V	
PENUTUP.....	VIII-1
 LAMPIRAN	



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	II-9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.. ..	II-11
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	II-12
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Kabupaten Belitung Timur.....	III-6
Tabel 4.1	Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui APBD II.....	IV-3
Tabel 4.2	Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui DAK.....	IV-9
Tabel 4.3	Usulan Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui APBD I.....	IV-11
Tabel 4.4	Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui APBN.....	IV-12
Tabel 4.5	Usulan Partisipatif (RPK) Tahun 2024.....	IV-13



Daftar Gambar

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah I-1



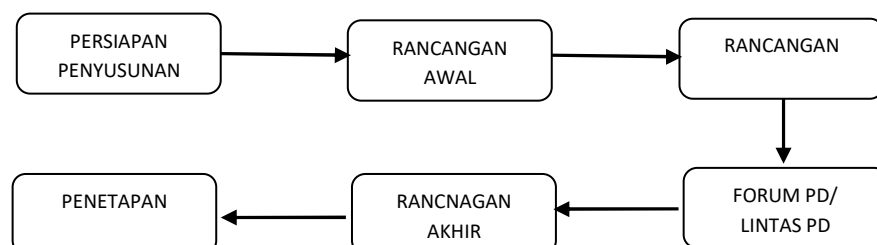
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2024 melalui tahapan-tahapan:

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Renja PD





Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Belitung Timur dan diselaraskan dengan RPJMD 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan dengan



- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
 20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2008 Nomor 85);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2012 Nomor 17);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitong Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2014 Nomor 19);
 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021 Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114)



26. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20); dan
27. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 27).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah menjabarkan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 yang meliputi rencana kerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2024;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memahami arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum



1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP

BAB V PENUTUP

Lampiran



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2022 sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan Tahun 2024.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 bersumber dari hasil Evaluasi pelaksanaan rencana kerja yang meliputi urusan Penanaman modal, urusan perdagangan dan urusan perindustrian tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur mencakup 14 Program, 25 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan
2. Pencapaian realisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur pada Triwulan IV tahun 2022 untuk realisasi capaian kinerja sebesar 97,63 Persen dengan predikat Sangat Tinggi (ST) sedangkan rata-rata capaian keuangan seluruh program sebesar 71,10 Persen dengan predikat Sedang (S). Untuk alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 16.281.913.675,- dapat direalisasikan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp



11.577.142.413,-. Untuk urusan penanaman modal capaian realisasi tahun 2022 diperoleh sebesar 88,22 persen dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.002.304.800,- dengan realisasi sebesar Rp 884.227.626,-

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Penanaman Modal									
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	100 persen	60	66,67 persen	60 persen	90,00	67,67 persen	persen	-
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	12 kebijakan	Na	2 kebijakan	3 kebijakan	150,00	2 kebijakan	kebijakan	-
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Sosialisasi dokumen kebijakan Daerah terkait penanaman modal	4 kali	Na	1 kali	1 kali	100,00	-		-
		Penyusunan dokumen kebijakan daerah terkait penanaman modal (Dokumen)	1 dokumen	Na	- dokumen	- dokumen	-	-		
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia	100 persen	Na	100 persen	100 persen	100,00	100	persen	-
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi potensi atau peluang usaha	5 dokumen	Na	1 dokumen	1 dokumen	100,00			
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi	2 investor	33	1 investor	37 investor	3700,00	2 investor		



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	4 sektor	Na	4	4	100,00	1 persen	sektor	-
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Facilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan UKM	9 UKM	Na	1 UKM	1 UKM	100,00			
		Laporan monitoring kerjasama penanaman modal	60 laporan	Na	12 laporan	12 laporan	100,00			
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Promosi peluang penanaman modal/investasi	18 kali	Na	1 kali	1 kali	100,00			
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	86 persen	83,4	83,5 persen	84,55 persen	101,26	84 persen		
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan	12 persen	Na	8 persen	-16,52 persen	-206,50	9 persen		
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	10 laporan	Na	2 laporan	1 laporan	50,00			-
		Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan	60 laporan	Na	12 laporan	12 laporan	100,00			



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen	300 kali	Na	-	-	-			-
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	22 investor	59	18 investor	34 investor	188,89	19 investor	investor	-
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	9 laporan	Na	7 persen	49,46 persen	706,57	7,5 persen	laporan	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	125 kali	Na	15 kali	15 kali	100,00			-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Moda	20 kali	Na	4 kali	4 kali	100,00			-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	750 kali	Na	50 kali	50 kali	100,00			-
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	100 persen	71,43	54,55 persen	85,71 persen	157,12	63,64 persen	persen	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	91,3 persen		89 persen	93,93 persen	105,54	90 persen	persen	



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang telah diolah	60 laporan	Na	12 laporan	12 laporan	100,00			25
	PERDAGANGAN									
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	45 persen	Na	26 persen	54,17 persen	208,35			-
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang memiliki izin	100	Na	25 persen	85,71 persen	342,84			-
	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sosialisasi dan pendampingan perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan	5 kali	Na	1 kali	1 kali	100,00			-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100 persen	100	100 persen	100 persen	100,00	100 persen	persen	-
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pembangunan/pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	100 persen	Na	100 persen	100 persen	100,00	100 persen	persen	-
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan/ Revitalisasi sarana prasarana perdagangan	60 unit	Na	1 unit	1 unit	100,00	3 unit	- unit	-



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Laporan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	8 laporan	Na	12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	laporan	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	2,99 persen	8,56	3,79 persen	10,56 persen	278,63	3,59 persen		
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten/ Kota di Tingkat Daerah	Tingkat kecukupan stok Bapokting (Barang Pokok dan Barang Penting)	150 hari	Na	60 hari	50 hari	83,33	75 har	hari	-
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pengawasan stok bapokting (barang pokok dan barang penting) yang dilakukan	72 kali	Na	12 kali	12 kali	100,00			
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Rata-rata Nasional	90 persen	Na	50 persen	-62,62 persen	-125,24	60 persen		
	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	60 kali	Na	12 laporan	12 laporan	100,00			
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Operasi Pasar Murah Bersubsidi	5 kali	Na	-	-	-			-
	Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	Rasio penerima pupuk terhadap RDKK	0,9 persen	Na	0,7 persen	25,83 persen	Na	0,75 persen	persen	-



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	Jumlah Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	20 kali	Na	4 kali	4 kali	100,00			-
	Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk yang dilakukan	10 kali	Na	2 kali	-	-			-
	Pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk yang dilakukan	60 kali	Na	12 kali	12 kali	100,00			-
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor	2 produk	Na	1 produk	2 produk	200,00	1 produk	produk	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha yang memperoleh Fasilitas Promosi Produk Unggulan Ekspor (Pelaku Usaha)	2 pelaku usaha	Na	2 pelaku usaha	7 pelaku usaha	350,00	3 pelaku usaha	pelaku usaha	-
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional	10 kali	Na	-	-	-			-
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal	10 kali	Na	-	-	-			-
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pembinaan pelaku/calon pelaku usaha ekspor	5 kali	Na	1 kali	1 kali	100,00			-
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	74 persen	62,42	72 persen	43,1 persen	59,86	72,5 persen	persen	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	78 persen	99,79	70 persen	89,47 persen	127,81	72 persen	persen	
	Kegiatan Pelaksanaan	UTTP Bertanda tera sah	950 UTTP	Na	850 UTTP	553 UTTP	65,06	875 UTTP	UTTP	



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

**RENCANA KERJA
2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran metrologi legal	3 pelaku usaha	Na	5 pelaku usaha	2 pelaku usaha	40,00	5 pelaku usaha	pelaku usaha	-
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera dan Tera Ulang	Jumlah Sidang Tera yang dilaksanakan	35 kali	Na	7 kali	7 kali	100,00			
		Pengadaan peralatan kemetrologian	65 unit	Na	-	-	-			
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan	35 kali	Na	7 kali	7 kali	100,00			
	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah penyidikan yang dilaksanakan	4 kali	Na	0 -	-	-			
	PERINDUSTRIAN									
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	6 persen	4,56	5,8 persen	5,09 persen	87,76	5,85 persen	persen	-
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri kecil menengah (IKM) yang berkembang/ tumbuh setelah mendapat pelatihan dan pendampingan	55 persen	Na	40	40	100,00	42,5 persen	persen	-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah sentra IKM yang dibina	25 sentra	Na	5 sentra	5 sentra	100,00			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah IKM yang disertifikasi	475 IKM	Na	95 IKM	99 IKM	104,21			



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah SDM IKM yang terlatih	200 IKM	Na	40 IKM	60 IKM	150,00			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kelompok IKM yang terfasilitasi sarana prasarana Industri	20 kelompok	Na	4 kelompok	5 kelompok	125,00			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah IKM yang terfasilitasi pembina kerajinan	150 IKM	Na	30 IKM	40 IKM	133,33			
		Pengadaan sarana prasarana pendukung kerajinan daerah	16 IKM	Na	-	-	-			
		Jumlah IKM non Kerajinan yang difasilitasi	160 IKM	Na	-	-	-			
	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan rencana Pembangunan Industri	Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan IKM	60 laporan	Na	12 laporan	12 laporan	100			
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha	35 persen	Na	25 persen	9,35 10	37,40	27,5 persen	persen	-
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase izin yang dipantau dan dianalisis terhadap izin yang dikeluarkan	30 persen	Na	10 persen	3,86 persen	38,60	15 persen	persen	-



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen pelaku usaha industri yang telah berizin usaha	20 kali	Na	4 kali	4 kali	100,00	4 kali		-
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi Industri di SIINAS	75 persen	58,33	58,33 persen	66,67 persen	114,30	58,33 persen	persen	-
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menyampaikan data dan informasi secara lengkap	92 persen		90 persen	84,61 persen	94,01	90,5 persen	persen	-
	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Laporan informasi data IKM	60 laporan	Na	12 laporan	12 laporan	100,00			
	URUSAN PENUNJANG									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	82 persen	79,16	70 persen	91,7 persen	131,00	73	persen	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 persen	Na	100	100	100,00	100	persen	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	20 dokumen	Na	4	4	100,00	4	dokumen	-



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100 persen	Na	100	100	100,00	100	persen	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	230 orang	Na	36 orang	32 orang	88,89	36	orang	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	83 persen	Na	75	75	100,00	77	persen	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia (Stel)	472 stel	Na	-	-	-			
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	Na	5	5	100,00			
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK	32 orang	Na	3	3	100,00			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	90 persen	Na	80	79,72	99,65	82,5	persen	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	55 jenis	Na	14 jenis	14 jenis	100,00			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	55 jenis	Na	55 jenis	55 jenis	100,00			



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	220 jenis	Na	34 jenis	34 jenis	100,00			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	45 jenis	Na	7 jenis	7 jenis	100,00			
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	40 jenis	Na	9 jenis	9 jenis	100,00			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 jenis	Na	2 jenis	2 jenis	100,00			
	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	40 kali	Na	8 kali	8 kali	100,00			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	282 kali	Na	85 kali	85 kali	100,00			
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	70 persen	Na	50	50	100,00	55 persen	persen	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	8 unit	Na	-	-	-			



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	4 unit	Na	-	-	-			
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131 unit	Na	-	-	-			
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 paket	Na	23 unit	23 unit	100,00			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang kantor	95 persen	Na	83 persen	83 persen	100,00	85	persen	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani	20 jenis	Na	3 jenis	3 jenis	100,00			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	25 jenis	Na	6 jenis	6 jenis	100,00			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	145 orang	Na	12 orang	12 orang	100,00			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Urusan Pemerintahan Daerah	97 persen	Na	90 persen	90 persen	100,00	92 persen	persen	-



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan	100 unit	Na	20 unit	20 unit	100,00			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	20 Bangunan	Na	4 Bangunan	4 Bangunan	100,00			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	50 unit	Na	38 unit	38 unit	100,00			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang direhabilitasi	2 unit	Na	- -	-		-	-	-



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur bersumber dari kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur yang mengampu urusan Penanaman modal diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD Perubahan 2021-2026. Penetapan Indikator ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing pada urusan masing-masing Perangkat Daerah. Akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan setiap tahun merupakan kondisi kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan urusan penanaman modal sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dalam tabel 2.2



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Indikator Renstra 2021-2026											
1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik PTSP			53	54	60	67	73,83	78,73	Na	78,73	Realisasi tahun 2023 belum tersedia karena data bersifat tahunan
1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang			65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	74,75 = C	85,33 = B	Na	85,33 = B	
1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah			B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	63,08 = B	71,72 BB	71,72 = BB	71,72 BB	
1.3	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan			Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang (79,99)	81,5 (kualitas tinggi)	Na	81,5 (kualitas tinggi)	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,6	2,7	2,8	2,9	2,15	2,7	Na	2,7	
2.1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi			63 persen	65,00 persen	67,00 persen	69,00 persen	83,33persen	100 persen	Na	100 persen	
3	Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN)			359,057 juta rupiah	378771 juta rupiah	390513 juta rupiah	472,466juta rupiah		1.373,500 juta rupiah	Na	1.373,500 juta rupiah	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
3.1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM			11,16 persen	11,20 persen	11,40 persen	11,60 persen	64,84 persen	22,67 persen	Na3	22,67 persen	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur pada Indikator Kinerja Utama perangkat daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah:

Urusan Penanaman Modal

1. Belum optimalnya pemahaman regulasi tentang pedoman tatacara pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM
2. Belum optimalnya pelaksanaan promosi penanaman modal
3. Belum optimalnya pemberdayaan kemitraan pelaku usaha
4. Belum optimalnya penyediaan data konsep potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan
5. Masih rendahnya jumlah pelaku usaha yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)
6. Belum maksimalnya nilai kepatuhan pelayanan perizinan
7. Belum optimalnya pemahaman pelaku usaha akan pentingnya melaporkan LKPM
8. Terbatasnya ketersediaan data yang valid dan terkini

Sedangkan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tantangan

1. Meningkatkan investasi yang masuk di Kabupaten Belitong Timur
2. Meningkatkan Fasilitas kerjasama kemitraan pelaku usaha kecil dan menengah dengan investor / pelaku usaha
3. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk memiliki izin dan pemenuhan komitmen.
4. Meningkatkan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Belitong Timur.
5. Menyediakan data dan informasi perizinan secara terintegrasi.
6. Membangun kepercayaan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Belitong Timur.

Peluang

Adanya dukungan komitmen dan Kebijakan Pusat untuk Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada pelayanan publik, peningkatan nilai investasi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program , kegiatan dan sub kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD, maupun DAK berikut pendanaan indikatif. Perbedaan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan sebagian besar disebabkan :

- Perubahan pagu indikatif yang disesuaikan dengan rencana target yang akan dicapai pada tahun 2024;
- Penyesuaian dengan anggaran yang tersedia, dengan prioritas
- Penyesuaian dengan usulan Musrenbang Kecamatan;

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur.



Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat. Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
URUSAN PENUNJANG										
10.527.747.000										8.167.871.552
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	76 Persen	10.527.747.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	76 Persen	8.167.871.552	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100 Persen	25.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100 Persen	25.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Beltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Beltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	25.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100	7.114.247.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100	4.754.371.552	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Beltim	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	36 Orang/bulan	7.114.247.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Beltim	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	36 Orang/bulan	4.754.371.552	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	79 Persen	171.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	79 Persen	171.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Beltim	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (paket)	1 paket	76.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Beltim	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (paket)	1 paket	76.000.000	



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat. Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Beltim, Luar daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6 orang	40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Beltim, Luar daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6 orang	40.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Beltim, Luar daerah	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	7 orang	55.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Beltim, Luar daerah	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	7 orang	55.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	85 Persen	857.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	85 Persen	857.500.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Beltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12 paket	28.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Beltim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12 paket	28.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Beltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	12 paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Beltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	12 paket	100.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Beltim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	9 paket	47.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Beltim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	9 paket	47.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Beltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	12 paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Beltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	12 paket	35.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Beltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 paket	85.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Beltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 paket	85.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Beltim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	3 Dokumen	7.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Beltim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	3 Dokumen	7.500.000	



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

**RENCANA KERJA
2024**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat. Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Beltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	8 laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Beltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	8 laporan	5.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	76 laporan	550.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	76 laporan	550.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	60 Persen	1.150.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	60 Persen	1.150.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Beltim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	5 unit	650.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Beltim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	5 unit	650.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Beltim	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1 unit	150.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Beltim	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1 unit	150.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Beltim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	13 unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Beltim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	13 unit	150.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Beltim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2 unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Beltim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	2 unit	200.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	88 Persen	765.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	88 Persen	765.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Beltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12 laporan	235.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Beltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12 laporan	235.000.000	



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat. Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Beltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	4 laporan	140.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Beltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	4 laporan	140.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Beltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan	390.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Beltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan	390.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	94 Persen	445.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	94 Persen	445.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Beltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	20 unit	315.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Beltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	20 unit	315.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Beltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	3 unit	65.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Beltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	3 unit	65.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Beltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	50 unit	65.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Beltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	50 unit	65.000.000	
URUSAN PENANAMAN MODAL				1.862.814.300					1.862.814.300	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)	66,67 Persen	250.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)	66,67 Persen	250.000.000	



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat. Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)	2 kebijakan	200.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)	2 kebijakan	200.000.000	
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Beltim	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	1 Dokumen	200.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Beltim	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	1 Dokumen	200.000.000	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase informasi investasi yang tersedia (Persen)	100 Persen	50.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase informasi investasi yang tersedia (Persen)	100 Persen	50.000.000	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab Beltim	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (dokumen)	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab Beltim	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (dokumen)	1 Dokumen	50.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Investor baru yang berinvestasi (Investor)	2 investor	630.187.500	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Investor baru yang berinvestasi (Investor)	2 investor	630.187.500	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)	4 sektor	630.187.500	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)	4 sektor	630.187.500	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Luar Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1 Dokumen	130.187.500	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Luar Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	1 Dokumen	130.187.500	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Beltim	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (dokumen)	1 Dokumen	500.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Beltim	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (dokumen)	1 Dokumen	500.000.000	



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat. Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)	84,5 Persen	339.195.800	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)	84,5 Persen	339.195.800	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (Persen)	10 Persen	339.195.800	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (Persen)	10 Persen	339.195.800	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Beltim	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	175 pelaku usaha	319.195.800	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Beltim	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	175 pelaku usaha	319.195.800	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab Beltim	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	60 kegiatan usaha	20.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab Beltim	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	60 kegiatan usaha	20.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)	20 investor	583.431.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)	20 investor	583.431.000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (Persen)	8 Persen	583.431.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (Persen)	8 Persen	583.431.000	



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat. Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Beltim	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	10 kegiatan usaha	140.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Beltim	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	10 kegiatan usaha	140.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Beltim	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	200 kegiatan usaha	218.431.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Beltim	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	200 kegiatan usaha	218.431.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Beltim	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (kegiatan usaha)	50 kegiatan usaha	225.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Beltim	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (kegiatan usaha)	50 kegiatan usaha	225.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)	72,73 Persen	60.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)	72,73 Persen	60.000.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (Persen)	90,5 Persen	60.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (Persen)	90,5 Persen	60.000.000	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Beltim	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)	12 Dokumen	60.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Beltim	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)	12 Dokumen	60.000.000	
				12.390.561.300					10.030.685.852	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memiliki usulan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan baik usulan aspiratif masyarakat melalui forum musrenbang maupun usulan aspiratif yang berasal dari pokir.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dinyatakan bahwa RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005–2025. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 menjadi tantangan besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020–2024.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 menjadi acuan penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Sementara itu, **Visi Presiden tahun 2020–2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** sedangkan **Misi Presiden tertuang dalam sembilan poin Nawacita** yang ditujukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, kebijakan pembangunan tahun 2022, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. **RKP 2024 bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dijabarkan dalam 8 arah kebijakan Prioritas RKP 2024, yaitu:

1. pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
2. peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan,
3. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
4. penguatan daya saing usaha,
5. pembangunan rendah karbon dan transisi energi,



6. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
7. percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan
8. pelaksanaan Pemilu 2024

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2024 dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menangani urusan penanaman modal adalah penguatan daya saing usaha.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan pada tahun 2024 berpedoman pada rancangan Rencana Strategis perubahan perangkat daerah periode 2021-2026 guna pencapaian visi dan misi Kabupaten Belitong Timur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Visi Kabupaten Belitong Timur untuk periode tahun 2021-2026 adalah **"Belitong Timur Bangkit dan Berdaya"**.

Untuk mendukung misi I : **Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik**, berikut tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur:

Tujuan:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

Sasaran :

- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja;
- Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah;
- Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi

Untuk mendukung misi II : **Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja**, berikut tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur :

Tujuan:



- Meningkatnya investasi;

Sasaran :

- Meningkatkan investor yang berinvestasi;
- Meningkatkan Produksi Industri Kecil dan Menengah;
- Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan;

3.2.1 Program Inovasi Daerah

Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur sebagai perangkat daerah yang menangani urusan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian berperan dalam inovasi daerah LAWANG BELTIM. Lawang Beltim adalah salah satu wujud pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagai sarana promosi yang berpengaruh terhadap opini publik, peningkatan kunjungan wisatawan serta keputusan investor dalam berinvestasi. Data-data maupun informasi yang disajikan dalam Lawang Beltim diharapkan mampu menjadi acuan atau kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur jangka panjang maupun jangka pendek

Inovasi lainnya yang masih akan dilakukan pada tahun 2024 oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur adanya **inovasi KIK MERAN** (Keliling Kampong Melayani Perizinan) yaitu inovasi yang akan dilakukan oleh bidang perizinan keliling untuk melayani pelaku usaha (UMKM) dalam pembuatan NIB. Sasaran dari inovasi KIK MERAN adalah para pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha berbasis OSS RBA. Sedangkan manfaatnya adalah untuk memudahkan para pelaku usaha dalam pengurusan izin.

Inovasi lainnya adalah **KLINIK LKPM**. Klinik LKPM dibuat dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaporan LKPM para pelaku usaha serta untuk optimalisasi capaian target realisasi investasi yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) diharapkan dapat menjadi wadah untuk membantu pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan LKPM online secara berkala karena pada perkembangannya dalam penyampaian LKPM para pelaku usaha sering menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan laporan LKPM tersebut tidak tersampaikan.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. Latar belakang akan dilaksanakannya kegiatan Klinik LKPM dikarenakan adanya permasalahan yang sering dihadapi para pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya antara lain ketidakpahaman pelaku usaha mengenai tata cara pengisian LKPM secara online, LKPM yang telah di *entry* tidak terkirim karena adanya error system, perubahan dalam manajemen pada perusahaan, adanya pemberitahuan perbaikan/revisi terkait isi LKPM tetapi pelaku usaha tidak memahami tata cara melakukan perbaikan pelaporan tersebut, adanya perubahan system pelaporan dan lain sebagainya.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal serta informasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan.
2. Membimbing dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mengawasi penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan perusahaan.

Manfaat :

1. Bagi Kabupaten Belitong Timur adalah tersedianya tempat informasi kegiatan penanaman modal yang ada di Kabupaten Belitong Timur sebagai realisasi investasi daerah.
2. Bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur :
 - a. Meningkatnya kinerja pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi
 - b. Ketersediaan data yang akurat dan tertib sesuai dengan prosedur yang ada



3. Bagi Masyarakat/Pelaku Usaha :

- a. Meningkatnya pelayanan publik khususnya bagi pelaku usaha
- b. Mempermudah dalam penyusunan LKPM

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur merupakan jalan untuk terwujudnya visi dan misi dari Kepala Daerah yang sudah menjadi visi dan misi Kabupaten Belitong Timur.

Untuk dapat memahami jenis dan pilihan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diajukan untuk pencapaian misi Kabupaten Belitong Timur, maka seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Penunjang

Terdiri dari 1 program, 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp 6.158.292.517,- Anggaran bersumber dari APBD.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Penanaman Modal terdiri dari 5 program, 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan total pagu usulan indikatif sebesar Rp 1.436.947.000,-yang bersumber dari APBD dan Alokasi Khusus (DAK) berupa DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dengan asumsi sama dengan yang diterima di tahun 2023 sebesar Rp 448.700.000,-

Jumlah seluruh anggaran pada rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitong Timur Tahun 2024 sebesar Rp 7.595.239.517,-

Berikut disajikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024:



Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitong Timur
Tahun 2024
Kabupaten Belitong Timur

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja Kepmendagri 050-5889 th 2021 (sub keg)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2024	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
URUSAN PENUNJANG					6.158.292.517				11.264.175.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		76	6.158.292.517			79	11.264.175.000
01. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)		100	7.172.000			100	20.000.000
01. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Belitung	4	7.172.000	Penerimaan Pembiayaan		4	20.000.000
01. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)		100	3.495.253.716			100	7.825.675.000
01. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Kab. Belitung	36	3.495.253.716	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		36	7.825.675.000
01. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)		79	43.200.000			81	181.000.000
01. 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (paket)	Kab. Belitung	0	0	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	76.000.000
01. 05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Kab. Belitung	0	0	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		6	40.000.000



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja Kepmendagri 050-5889 th 2021 (sub keg)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2024	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
01. 05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Kab. Beltim	8	43.200.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		7	65.000.000
01. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		85	658.309.000			87,5	912.500.000
01. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Kab. Beltim	12	20.340.000	Penerimaan Pembiayaan		12	28.000.000
01. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	Kab. Beltim	12	123.048.000	Penerimaan Pembiayaan		12	105.000.000
01. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	Kab. Beltim	9	41.716.000	Penerimaan Pembiayaan		9	47.000.000
01. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Kab. Beltim	12	40.465.000	Penerimaan Pembiayaan		12	35.000.000
01. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Kab. Beltim	12	72.905.000	Penerimaan Pembiayaan		12	85.000.000
01. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	Kab. Beltim	3	4.860.000	Penerimaan Pembiayaan		3	7.500.000
01. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Kab. Beltim	8	4.975.000	Penerimaan Pembiayaan		8	5.000.000
01. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Luar Daerah	76	350.000.000	Penerimaan Pembiayaan		76	600.000.000
01. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		60	413.548.000			65	730.000.000



Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja Kepmendagri 050-5889 th 2021 (sub keg)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2024	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
01. 07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Kab. Beltim	5	360.942.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		0	-
01. 07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Kab. Beltim	0	0	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	350.000.000
01. 07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kab. Beltim	13	52.606.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		13	180.000.000
01. 07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Kab. Beltim	0	0	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		2	200.000.000
01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)		88	1.305.529.801			91	775.000.000
01. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Kab. Beltim	12	278.656.362	Penerimaan Pembiayaan		4	245.000.000
01. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Kab. Beltim	12	183.260.000	Penerimaan Pembiayaan		5	140.000.000
01. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Kab. Beltim	12	843.613.439	Penerimaan Pembiayaan		29	390.000.000
01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)		94	235.280.000			95	820.000.000
01. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Kab. Beltim	20	147.430.000	Penerimaan Pembiayaan		20	355.000.000



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja Kepmendagri 050-5889 th 2021 (sub keg)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2024	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
01. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Kab. Beltim	3	64.230.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		3	430.000.000
01. 09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Kab. Beltim	50	23.620.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		50	35.000.000
URUSAN PENANAMAN MODAL					1.436.947.000				1.688.773.500
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)		66,67	39.246.000			100	60.000.000
02. 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)		2	9.026.000			3	10.000.000
02. 01. 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	Kab. Beltim	1	9.026.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	10.000.000
02. 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia (Persen)		100	30.220.000			100	50.000.000
02. 02. 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (dokumen)	Kab. Beltim	1	30.220.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		1	50.000.000
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi (Investor)		2	494.239.000				630.187.500
03. 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)		4	494.239.000			4	630.187.500



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja Kepmendagri 050-5889 th 2021 (sub keg)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2024	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
03. 01. 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	Kab. Beltim	1	4.350.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	130.187.500
03. 01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (dokumen)	Luar Daerah	1	489.889.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	500.000.000
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)		84,5	308.997.500			85	355.155.000
04. 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (Persen)		10	308.997.500			11	355.155.000
04. 01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	Kab. Beltim	175	270.937.500	Pendapatan Transfer Antar Daerah		175	335.155.000
04. 01. 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	Kab. Beltim	60	38.060.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		60	20.000.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)		20	547.321.500			21	583.431.000
05. 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (Persen)		8	547.321.500			8,5	583.431.000



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja Kepmendagri 050-5889 th 2021 (sub keg)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2024	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
05. 01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	Kab. Beltim	10	100.181.500	Pendapatan Transfer Antar Daerah		10	140.000.000
05. 01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	Kab. Beltim	200	288.879.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		200	218.431.000
05. 01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (kegiatan usaha)	Kab. Beltim	50	158.261.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		150	225.000.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)		72,73	47.143.000			81,82	60.000.000
06. 01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (Persen)		90,5	47.143.000			91	60.000.000
06. 01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)		12	47.143.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		12	60.000.000
JUMLAH SELURUHNYA					7.595.239.517				12.952.948.500



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPPTSP

Rencana kerja program dan kegiatan tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung Timur berdasarkan sumber dana dan usulan akan diuraikan sebagai berikut:

4.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2023 melalui APBD II

Rencana kerja program dan kegiatan yang sumber dana berasal dari murni APBD II dapat dilihat pada tabel 4.1. Rencana Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 yang bersumber dari APBD sebesar Rp7.146.539.517,- dari seluruh anggaran sebesar Rp 7.595.239.517,-

Pada Bab ini juga disajikan Tabel Rencana Kerja tahun 2024 yang diambil dari aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). (lampiran)

Urusan penanaman modal terdiri dari 5 program, 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan total usulan pagu yang bersumber dari APBD sebesar Rp 988.247.000,- dengan lokasi pesebaran kegiatan di kabupaten Belitung Timur dan sebagian Luar Daerah dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Penanaman Modal.

4.2 Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui DAK

DAK Non fisik Fasilitas Penanaman Modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitas penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Rencana kerja program dan kegiatan yang sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2024 diasumsikan sama dengan tahun 2023 sejumlah Rp 448.700.000,- dapat dilihat di tabel 4.2

Rencana tersebut berupa DAK Non Fisik Bidang Fasilitas Penanaman Modal akan digunakan untuk pembinaan dan pengawasan kegiatan Penanaman modal

4.3 Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui APBD I dan DABA

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung Timur tidak mengusulkan dikarenakan dari Provinsi tidak ada rencana DABA urusan penanaman modal, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.3



4.4 Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui APBN

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur

Tidak mengusulkan rencana kerja menggunakan APBN. Dapat dilihat pada tabel 4.4

4.5 Usulan Partisipatif (RPK) Tahun 2024

Usulan partisipatif masyarakat untuk tahun 2024 pada rencana kerja urusan Penanaman modal tidak ada usulan.



Tabel 4.1
Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui APBD II

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja Kepmendagri 050-5889 th 2021 (sub keg)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2024	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
URUSAN PENUNJANG					6.158.292.517				11.264.175.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		76	6.158.292.517			79	11.264.175.000
01. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)		100	7.172.000			100	20.000.000
01. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Beltim	4	7.172.000	Penerimaan Pembiayaan		4	20.000.000
01. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)		100	3.495.253.716			100	7.825.675.000
01. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Kab. Beltim	36	3.495.253.716	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		36	7.825.675.000
01. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)		79	43.200.000			81	181.000.000
01. 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (paket)	Kab. Beltim	0	0	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	76.000.000
01. 05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Kab. Beltim	0	0	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		6	40.000.000
01. 05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Kab. Beltim	8	43.200.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		7	65.000.000



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2024**

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja Kepmendagri 050-5889 th 2021 (sub keg)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2024	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
01. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		85	658.309.000			87,5	912.500.000
01. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Kab. Beltim	12	20.340.000	Penerimaan Pembiayaan		12	28.000.000
01. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	Kab. Beltim	12	123.048.000	Penerimaan Pembiayaan		12	105.000.000
01. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	Kab. Beltim	9	41.716.000	Penerimaan Pembiayaan		9	47.000.000
01. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Kab. Beltim	12	40.465.000	Penerimaan Pembiayaan		12	35.000.000
01. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Kab. Beltim	12	72.905.000	Penerimaan Pembiayaan		12	85.000.000
01. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	Kab. Beltim	3	4.860.000	Penerimaan Pembiayaan		3	7.500.000
01. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Kab. Beltim	8	4.975.000	Penerimaan Pembiayaan		8	5.000.000
01. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Luar Daerah	76	350.000.000	Penerimaan Pembiayaan		76	600.000.000
01. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		60	413.548.000			65	730.000.000
01. 07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Kab. Beltim	5	360.942.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		0	-



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2024**

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja Kepmendagri 050-5889 th 2021 (sub keg)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2024	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
01. 07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Kab. Belitim	0	0	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	350.000.000
01. 07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kab. Belitim	13	52.606.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		13	180.000.000
01. 07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Kab. Belitim	0	0	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		2	200.000.000
01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)		88	1.305.529.801			91	775.000.000
01. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Kab. Belitim	12	278.656.362	Penerimaan Pembiayaan		4	245.000.000
01. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Kab. Belitim	12	183.260.000	Penerimaan Pembiayaan		5	140.000.000
01. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Kab. Belitim	12	843.613.439	Penerimaan Pembiayaan		29	390.000.000
01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)		94	235.280.000			95	820.000.000
01. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Kab. Belitim	20	147.430.000	Penerimaan Pembiayaan		20	355.000.000
01. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Kab. Belitim	3	64.230.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		3	430.000.000



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja Kepmendagri 050-5889 th 2021 (sub keg)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2024	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
01. 09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Kab. Beltim	50	23.620.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		50	35.000.000
URUSAN PENANAMAN MODAL					1.436.947.000				1.688.773.500
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)		66,67	39.246.000			100	60.000.000
02. 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)		2	9.026.000			3	10.000.000
02. 01. 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	Kab. Beltim	1	9.026.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	10.000.000
02. 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia (Persen)		100	30.220.000			100	50.000.000
02. 02. 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (dokumen)	Kab. Beltim	1	30.220.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		1	50.000.000
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi (Investor)		2	494.239.000				630.187.500
03. 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)		4	494.239.000			4	630.187.500
03. 01. 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)	Kab. Beltim	1	4.350.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	130.187.500
03. 01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (dokumen)	Luar Daerah	1	489.889.000	Dana Transfer Umum_Dana		1	500.000.000



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja Kepmendagri 050-5889 th 2021 (sub keg)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2024	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
						Alokasi Umum			
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)		84,5	308.997.500			85	355.155.000
04. 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (Persen)		10	308.997.500			11	355.155.000
04. 01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	Kab. Beltim	175	270.937.500	Pendapatan Transfer Antar Daerah		175	335.155.000
04. 01. 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	Kab. Beltim	60	38.060.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		60	20.000.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)		20	98.621.500			21	583.431.000
05. 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (Persen)		8	98.621.500			8,5	583.431.000
05. 01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	Kab. Beltim	10	33.240.500	Pendapatan Transfer Antar Daerah		10	140.000.000



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2024

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja Kepmendagri 050-5889 th 2021 (sub keg)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2024	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
05. 01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	Kab. Beltim	200	65.381.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		200	218.431.000
05. 01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (kegiatan usaha)	Kab. Beltim	50	0	Pendapatan Transfer Antar Daerah		150	225.000.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)		72,73	47.143.000			81,82	60.000.000
06. 01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (Persen)		90,5	47.143.000			91	60.000.000
06. 01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)		12	47.143.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		12	60.000.000
JUMLAH SELURUHNYA					7.146.539.517				12.952.948.500



Tabel 4.2
Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui DAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Nilai Rincian Kegiatan
DAK Non Fisik Bidang Fasilitas Penanaman Modal									
2 18 05 2	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)		20 investor					
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (Persen)		8 persen					
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Belitim dan Luar Daerah	10 kegiatan usaha	Identifikasi, penyelesaian dan evaluasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Kab Belitim	10	perusahaan	66.941.000
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Belitim	200 kegiatan usaha	Bimbingan Teknis di Bidang Penanaman Modal	Kab Belitim	200	perusahaan	223.498.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Nilai Rincian Kegiatan
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Belim	50 kegiatan usaha	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Belim	50	perusahaan	158.261.000
Jumlah Usulan DAK Non Fisik									448.700.000



Tabel 4.3
Usulan Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui APBD I

No	Perangkat Daerah Provinsi	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Output	Lokasi	
						Kecamatan/ kelurahan/desa	Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5	6	7	
URUSAN PENANAMAN MODAL							
	---	---	---	---	---	---	---



Tabel 4.4
Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui APBN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	URUSAN								
	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL								
TOTAL						-			



Tabel 4.5
Usulan Partisipatif (RPK) Tahun 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pekerjaan			Lokasi Pekerjaan		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Pendanaan	Status Usulan
	Uraian	Satuan	Target	Kec	Desa			(Diterima/ Ditolak/ Ditunda)
URUSAN PENANAMAN MODAL								



BAB V PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah dan menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Demikian diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna pencapaian Visi dan Misi Pemerintah kabupaten Belitung Timur dan Kinerja Perangkat daerah di Tahun 2024

Manggar, 07 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST

NIP 19750821 200212 1 005

FORMULIR PEMETAAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

Nama PD : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Urusan / Kode : Penanaman Modal / 18
 Bidang Urusan/Kode : Penanaman Modal

SEBELUM PEMUTAKHIRAN									SESUDAH PEMUTAKHIRAN			
Kode Program	Program	Hasil Program/Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan/Output	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
			01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	01. 2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2.18.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
						01. 2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.18.01.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
						01. 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			01. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
						01. 2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2.18.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	
						01. 2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2.18.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	
						01. 2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
						01. 2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.18.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
						01. 2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.18.01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	

[illegible]

SEBELUM PEMUTAKHIRAN									SESUDAH PEMUTAKHIRAN			
Kode Program	Program	Hasil Program/Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan/Output	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	02. 2.01. 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			02. 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia	02.2.02. 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Ada menjadi Tidak ada dan diusulakn sub kegiatan pemutakhiran
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi (Investor)	03. 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	03. 2.01. 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Ada menjadi Tidak ada dan diusulakn sub kegiatan pemutakhiran
						03. 2.01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	04. 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan	04.2.01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Ada menjadi Tidak ada dan diusulakn sub kegiatan pemutakhiran
						04. 2.01. 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Ada menjadi Tidak ada dan diusulakn sub kegiatan pemutakhiran
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	05. 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (Persen)	05. 2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Ada menjadi Tidak ada dan diusulakn sub kegiatan pemutakhiran
						05. 2.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan usaha)	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Ada menjadi Tidak ada dan diusulakn sub kegiatan pemutakhiran
						05.2.01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (kegiatan usaha)	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	Ada menjadi Tidak ada dan diusulakn sub kegiatan pemutakhiran

SEBELUM PEMUTAKHIRAN									SESUDAH PEMUTAKHIRAN			
Kode Program	Program	Hasil Program/Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan/Output	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	06. 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	06.2. 01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Ada menjadi Tidak ada dan diusulakn sub kegiatan pemutakhiran



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
 - b. bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memerlukan adanya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kabupaten Belitung Timur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan Renja PD berpedoman kepada Renstra PD Tahun 2021-2026.
- (3) Penyusunan Renja PD juga berpedoman kepada hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan.
- (4) Renja PD digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKA PD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyusunan Renja PD Tahun 2024, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU;

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
Memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan kegiatan.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
Memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
- BAB V : PENUTUP.
Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

- (2) Isi beserta Uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

Pasal 5

Kepala PD wajib melaksanakan Renja PD dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Renja PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renja PD kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 AGUSTUS 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 32

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	Nama Perangkat Daerah	Hasil Verifikasi
1	Sekretariat Daerah	Sesuai
2	Sekretariat DPRD	Sesuai
3	Inspektorat	Sesuai
4	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sesuai
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sesuai
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sesuai
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai
8	Dinas Pendidikan	Sesuai
9	Dinas Kesehatan	Sesuai
10	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sesuai
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sesuai
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sesuai
13	Dinas Perhubungan	Sesuai
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sesuai
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sesuai
17	Dinas Pertanian dan Pangan	Sesuai
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai
19	Dinas Perikanan	Sesuai
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai
21	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai
22	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sesuai
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sesuai
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai
25	Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sesuai
27	Kecamatan Manggar	Sesuai
28	Kecamatan Gantung	Sesuai
29	Kecamatan Kelapa Kampit	Sesuai
30	Kecamatan Dendang	Sesuai
31	Kecamatan Damar	Sesuai
32	Kecamatan Simpang Renggang	Sesuai
33	Kecamatan Simpang Pesak	Sesuai

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						7.595.239.517,00							12.952.948.500,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.595.239.517,00							12.952.948.500,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						7.595.239.517,00							12.952.948.500,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	-			76 Persen	6.158.292.517,00						-	11.264.175.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	-			100 Persen	7.172.000,00			-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-	-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	7.172.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	-			100 Persen	3.495.253.716,00			-	Pembangu nan Peme ri ntahan 1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-	-	7.825.675.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	3.495.253.716,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		7.825.675.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	-			79 Persen	43.200.000,00			-	Pembangu nan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	181.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		76.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	43.200.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	-			85 Persen	658.309.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	912.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.340.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		28.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	123.048.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan Pemerintahan	-		105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	41.716.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		47.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	40.465.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Pembangu nan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	72.905.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Pembangu nan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	4.860.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Pembangu nan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	4.975.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Pembangu nan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68 Laporan	350.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Pembangu nan Pemer intahan 1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-		600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	-			60 Persen	413.548.000,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-	-	730.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	360.942.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangu nan Pemer intahan 1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	52.606.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pembangu nan Pemer intahan 1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-		180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	-			88 Persen	1.305.529.801,00			-	Pembangunan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	775.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	278.656.362,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		245.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	183.260.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Pembangunan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	843.613.439,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Pembangu nan Pemer intahan 1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-		390.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</i>	-			94 Persen	235.280.000,00			-	Pembangu nan Pemer intahan 1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-	-	820.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	147.430.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	Pembangu nan Pemer intahan 1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-		355.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	64.230.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-		430.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				50 Unit	23.620.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Cakupan kebijakan daerah terkait penanaman modal yang telah ditetapkan</i>	-			66,67 Persen	39.246.000,00						-	60.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan</i>	-			2 kebijakan	9.026.000,00			-	Pembangu nan Ekonomi 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	Penanam Modal/ Investor dan pelaku usaha	-	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>				1 Dokumen	9.026.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Ekonomi 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	Penanam Modal/ Investor dan pelaku usaha		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Ekonomi 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	Penanam Modal/ Investor dan pelaku usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Persentase informasi investasi yang tersedia</i>	-			100 persen	30.220.000,00			-	Pembangu nan Ekonomi 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	-	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>				1 Daerah	30.220.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Pembangunan Ekonomi 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Investor baru yang berinvestasi</i>	-			2 Investor	494.239.000,00						-	630.187.500,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>cakupan sektor usaha yang dipromosikan</i>	-			4 sektor	494.239.000,00			-	Pembangunan Ekonomi 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	Penanam Modal/ Investor dan pelaku usaha	-	630.187.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	489.889.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	Penanam Modal/ Investor dan pelaku usaha		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>				1 Dokumen	4.350.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	Penanam Modal/ Investor dan pelaku usaha		130.187.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu</i>	-			84,5 Persen	308.997.500,00						-	355.155.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan</i>	-			10 persen	308.997.500,00			-	Pembangunan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	355.155.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				175 Pelaku Usaha	270.937.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Pembangu nan Pemerintahan 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		335.155.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>				60 Kegiatan Usaha	38.060.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Investor baru yang berskala nasional yang merealisasikan investasinya</i>	-			20 investor	547.321.500,00						-	583.431.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)</i>	-			8 persen	547.321.500,00			-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	-	-	583.431.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				12 Kegiatan Usaha.	100.181.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-FASI LITASI PENANAMAN MODAL	-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	-		140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				216 Pelaku Usaha	288.879.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-FASI LITASI PENANAMAN MODAL	-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	-		218.431.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				65 Kegiatan Usaha	158.261.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	-		225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data Perizinan, Non Perizinan dan Indormasi Penanaman Modal dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	-			72,73 persen	47.143.000,00						-	60.000.000,00		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	-			90,50 Persen	47.143.000,00			-	Pembangunan Ekonomi 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik															
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	47.143.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Pembangunan Ekonomi 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	J U M L A H							7.595.239.517,00							12.952.948.500,00		